

LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI JAWA TENGAH MENGENAI HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DISAMPAIKAN OLEH: Drs. ANTON LAMI SUHADI, M.Si

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera buat kita semua.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kepada para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan mengikuti Rapat Paripurna Dewan, yang salah satu acaranya laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Rancangan Peraturan DPRD Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa, dilakukan untuk melakukan penyempurnaan atas pelaksanaan kewenangan DPRD, Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang secara implementatif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan mendasarkan pada Keputusan DPRD terhadap pembentukan Panitia Khusus I tahun 2022 yang salah satu kegiatanya adalah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dimana telah melakukan kunjungan kerja dan pembahasan terhadap yang secara mendalam komprehensif.

Kemudian dari hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud dikonsultasikan dan dimintakan fasilitasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri guna memenuhi amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Sedangkan hasil pembahasan, konsultasi dan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan DPRD Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat kami laporkan sebagai berikut :

 Perubahan terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebelumnya disampaikan sebanyak 9 (Sembilan) point perubahan, setelah dilakukan pembahasan dan konsultasi berubah menjadi 14 (empat Belas) Point perubahan.

- 2. Berdasarkan hasil fasilitasi dari kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan DPRD Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dari 14 (empat Belas) Point perubahan, yang diterima 10 (sepuluh) point, sebagaimana terlampir pada Rancangan yang ada di hadapan bapak ibu peserta paripurna. Adapun point-point yang diminta dihapus oleh kemendagri diantaranya:
 - a. Pengkajian terhadap Raperda Yang di Usulkan Gubernur pada saat proses penyusunan Propemperda.
 - b. Pembahasan KUA PPAS yang dapat dibantu Oleh Komisi.
 - c. Fasilitasi Staff adminitrasi.
 - d. Penambahan insensif bagi Tenaga Ahli.

Atas dasar tersebut Panitia Khusus dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, merekomendasikan beberapa hal diantaranya:

- 1. Dalam rangka mengakomodir pengaturan terhadap fasilitasi Staff Adminitrasi bagi Anggota DPRD, agar tidak terjadi temuan-temuan atas penggunaan yang sudah dilakukan, maka DPRD Perlu melakukan Perubahan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dengan memasukan fasilitasi staff adminitrasi kedalam Perda tersebut, sebagaimana dilakukan di Provinsi Jawa Timur.
- Dalam rangka mengakomodir peran Komisi dalam Pembahasan Perencanaan Daerah, maka perlu dilakukan Pendalaman yang secara komprehensif pada saat pembahasan RKPD, mengingat di Era penerapan SIPD, pencermatan di dalam RKPD merupakan kunci utama dalam perencaan pembangunan daerah.
- Terhadap pengkajian Perda Usulan Gubernur, hal tersebat dapat dilakukan Bapemperda sebagai fungsi melakukan pengkajian, sehingga perlu difasilitasi.
- Terhadap insentif Tenaga Ahli perlu dilakukan pengkajian Kembali mana lebih efektif insentif berbasis bulan atau berbasis kenerja (system Ad hok).

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikian laporan mengenai hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjunya kami mengharap kepada Para Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan DPRD dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan dan meridhoi usaha-usaha luhur kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 September 2022

PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Ketua,

Drs. MUHAMMAD YUNUS